

SUBSIDI BBM SEBAGAI PENYEBAB DEFISIT NERACA PERDAGANGAN

Niken Paramita Purwanto^{*)}



Abstrak

Neraca Perdagangan Indonesia mengalami defisit di Bulan Februari 2013 sebesar US\$327,4 juta. Salah satu sebabnya adalah defisit neraca perdagangan migas yang cukup besar. Tahun ini merupakan titik terendah produksi minyak, sekitar 840.000–850.000 barrel per hari (BPH). Sedang kebutuhan BBM bersubsidi tahun 2013 diprediksi 50 juta kl hingga akhir tahun. Kebutuhan energi yang besar di dalam negeri harus dikompensasi dengan mendatangkan minyak dari luar yang cukup besar. Beragam cara pengendalian dilakukan pemerintah untuk menekan konsumsi BBM, namun tidak membuahkan hasil maksimal. Bila melihat pengalaman solusi mekanisme harga melalui penyesuaian harga BBM dan dampak turunannya, serta konstelasi ekonomi global yang kurang menggembarakan, tampaknya pengendalian BBM bersubsidi menjadi opsi yang paling tepat untuk solusi jangka pendek.

A. Pendahuluan

Neraca Perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit di Bulan Februari 2013 sebesar US\$327,4 juta. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin, penyebab defisit neraca perdagangan adalah karena migas masih defisit cukup tinggi. Komoditas non-migas pada bulan Februari surplus US\$777,9 juta. Namun komoditas migas defisit US\$1,1 miliar. Dengan demikian, neraca perdagangan defisit US\$327,4 juta atau lebih besar jika dibandingkan bulan Januari sebesar US\$171 juta. Defisit terjadi pada perdagangan minyak mentah dan produk minyak. Masing-masing defisit senilai US\$12,8

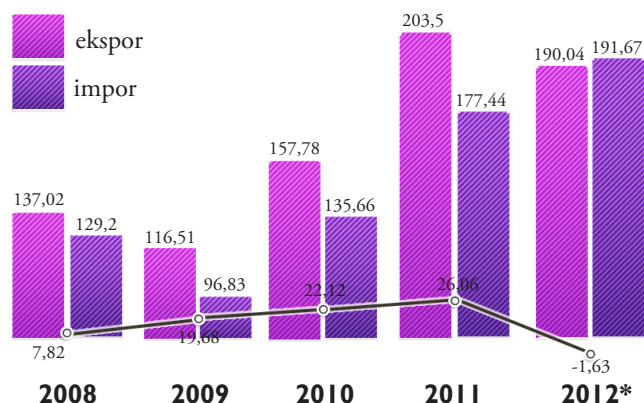
juta dan US\$2,26 juta. Sementara perdagangan non-migas mengalami surplus US\$1,16 miliar. Secara kumulatif (Januari–Februari 2013) jumlah defisit perdagangan Indonesia mencapai US\$402,1 juta. Neraca komoditas Januari–Februari migas mengalami defisit senilai US\$2,42 miliar, sedangkan komoditas non-migas mengalami surplus US\$2,012 miliar.

Defisit neraca perdagangan Februari makin menunjukkan bahwa tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan neraca perdagangan selain mengendalikan impor migas. Bentuk konsumsi BBM domestik harus dikendalikan. Sudah banyak cara yang diwacanakan oleh pemerintah seperti pembatasan pembelian BBM bersubsidi

^{*)} Peneliti bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: paramita.niken@yahoo.co.id



Grafik Neraca Perdagangan 2008–2012



2012* Sampai dengan November

Sumber: Badan Pusat Statistik

di antaranya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. Peraturan ini memuat tambahan pengendalian BBM jenis premium dan solar untuk kendaraan dinas, pengendalian BBM untuk sektor kehutanan, serta sektor transportasi laut.

B. Pengaruh Subsidi BBM terhadap Neraca Perdagangan

Pengertian subsidi BBM berdasarkan RAPBN dan Nota Keuangan adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Pertamina dalam situasi di mana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut.

Membbaiknya perekonomian Indonesia diiringi membaiknya kehidupan masyarakat, terlihat dari bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap bulan. Untuk mempertahankan kuota BBM bersubsidi yang disetujui oleh pemerintah dan DPR maksimal sebesar 46 juta kiloliter (kl) dirasakan sangat berat oleh Menteri ESDM. Konsumsi BBM subsidi pada Januari 2013 untuk Premium mencapai 2.391.418 kl, solar mencapai 1.277.670 kl, dan minyak tanah/ kerosin mencapai 95.075 kl. Pada Februari, konsumsi BBM subsidi mencapai 2.192.430 kl, solar mencapai 1.165.267 kl, dan minyak tanah mencapai 89.641 kl. Konsumsi BBM bersubsidi yang berlebih ini disebabkan kebijakan

Tabel 1.
Neraca Pembayaran Indonesia
2011–2012 (US\$)

	2011	2012
Transaksi Berjalan	1.685	-24.183
Barang	34.783	8.417
Jasa	-10.632	-10.770
Pendapatan	-26.676	-25.839
Transfer Berjalan	4.211	4.009
Transaksi Modal & Finansial	13.567	24.911
Transaksi Modal	33	37
Transaksi Finansial	13.534	24.873
Total	15.252	728
Selisih Perhitungan Bersih	3.395	-563
Neraca Keseluruhan	11.857	165
Cadangan Devisa (*)	-11.857	-165
Posisi Cadangan Devisa	110.123	112.781
Dalam bulan impor	6.6	6.1

* negatif berarti surplus, positif berarti defisit

Sumber: Bank Indonesia

pembatasan BBM bersubsidi kalah cepat dibanding pertumbuhan jumlah mobil di Tanah Air. Kendaraan-kendaraan pribadi ini juga lebih sering memakai BBM bersubsidi dibanding BBM non-subsidi. Data lebih detail mengenai jumlah kuota dan subsidi BBM dapat dilihat pada Tabel.

Menurut Kepala BPS, tahun 2012 merupakan titik terendah produksi gas, diperkirakan tahun ini merupakan titik terendah produksi minyak, sekitar 840.000–850.000 barrel per hari (BPH). Sedang kebutuhan BBM bersubsidi tahun 2013 diprediksi 50 juta kl hingga akhir tahun. Kebutuhan energi yang besar di dalam negeri harus dikompensasi dengan mendatangkan migas dari luar yang cukup besar. Jika pola ini diteruskan di tengah situasi ekonomi dan energi dunia yang kompetitif akan sulit mencapai peningkatan perekonomian yang lebih

Tabel 2.
Kuota dan Realisasi BBM
tahun 2012–2013 (Juta kl)

Bahan Bakar	2012		2013	
	Kuota	Realisasi	Kuota	Realisasi
Premium	28,31	28,24	29,20	31,46*
Solar	15,6	15,56	15,11	16,99*
Minyak Tanah	1,2	1,1	1,7	1,2*

* prediksi realisasi BBM

Sumber: Badan Pusat Statistik

tinggi. Beragam cara pengendalian dilakukan pemerintah untuk menekan konsumsi BBM, namun tidak membuahkan hasil maksimal. Keterdesakan penyediaan BBM dilakukan dengan melakukan importasi minyak yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Dibutuhkan keseriusan bukan hanya di sektor kebijakan, namun juga pada kemampuan mengeksekusi dan implementasi kebijakan tersebut. Bank Indonesia mencatat, tingginya impor migas tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan likuiditas valas domestik. Melihat kondisi seperti ini pemerintah harus segera melakukan upaya penyelamatan bagi neraca perdagangan khususnya dalam jangka pendek, yakni dengan cara mengurangi ekspor minyak mentah dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak yang angkanya terus meningkat tajam. Dalam jangka menengah dan panjang pemerintah harus mengoptimalkan pasar Asia, seperti China dan India, untuk tujuan ekspor produk non-migas di mana angka konsumsi di negara-negara itu masih tumbuh tinggi. Selain itu, ekspor sektor industri harus digenjut dan jangan terlalu tergantung pada ekspor komoditas yang sangat rentan terhadap gejolak luar negeri.

C. Strategi Subsidi BBM untuk Mengurangi Defisit Neraca Perdagangan

Beberapa cara mengatasi defisit yaitu dengan menghapus subsidi atau menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal tersebut akan berdampak pada ketidakstabilan harga hingga meningkatnya inflasi. Tindakan yang harus dilakukan Pemerintah adalah merumuskan subsidi agar tepat sasaran, sehingga pada saat pendistribusian subsidi BBM tidak menimbulkan ketidakadilan. Pengalaman menunjukkan, masih ada BBM bersubsidi yang digunakan oleh kalangan menengah ke atas.

Menurut Menteri Perekonomian, ada tiga opsi yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penggunaan BBM yaitu opsi pertama dengan menggunakan IT (*information technology*). Caranya dengan memasang *chip* di setiap mobil. Melalui sistem yang *online* secara nasional maka setiap mobil yang telah dipasang *chip* akan terpantau penggunaan BBM-nya. Data mengenai jumlah penggunaan BBM dalam satu bulan akan

terpantau secara otomatis. Begitu pun ketika ada mobil pribadi yang menggunakan BBM subsidi maka *chip* itu akan mengunci secara otomatis sehingga mesin pengisian SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) tidak dapat melakukan pengisian dengan BBM bersubsidi.

Menurut perkiraan, anggaran yang diperlukan untuk menjalankan sistem IT ini mencapai Rp800 miliar per tahun. Pertamina tidak perlu khawatir akan anggaran untuk sistem ini, karena bisa diambilkan dari deviden. Dengan *chip* ini mobil juga tidak bisa membeli BBM melebihi kuota yang sudah ditetapkan. Opsi kedua, dengan melakukan konversi, opsi ini akan sangat mengurangi konsumsi BBM. Untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah menawarkan konversi pemakaian BBM ke bahan bakar gas (BBG). Opsi ketiga, Indonesia memberlakukan Nilai Oktan 90. Saat ini premium menggunakan Nilai Oktan 80 sementara pertamax memiliki Nilai Oktan 92. Jika Nilai Oktan 90 diberlakukan maka kelasnya bisa di atas premium tetapi masih di bawah premium sehingga bisa ditawarkan di kisaran Rp7.000.

Pemerintah pernah melakukan tiga kali penyesuaian harga yaitu pada 2005 (Maret dan Oktober) dan 2008 (Oktober), di mana dalam perjalanan penyesuaian harga BBM bersubsidi berdampak luas kepada perekonomian nasional. Penyesuaian harga memiliki efek langsung maupun tidak langsung, antara lain terkait dengan peningkatan jumlah masyarakat miskin, inflasi, beban biaya produksi nasional, biaya transportasi, serta daya beli masyarakat. Menjaga daya beli masyarakat untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional semakin dibutuhkan ketika melesunya perekonomian global. Selain itu, kenaikan sejumlah kebutuhan pokok seperti daging, bawang merah dan bawang putih telah mendorong inflasi Januari–Februari 2013 mencapai 1,79 persen. Kalau penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan maka tekanan inflasi untuk 2013 akan menjadi lebih besar lagi, demikian pula dampak turunannya terhadap perekonomian nasional.

Bila melihat pengalaman solusi mekanisme harga melalui penyesuaian harga BBM dan dampak turunannya, serta konstelasi ekonomi global yang kurang mengembirakan, tampaknya pengendalian BBM bersubsidi menjadi opsi yang paling tepat sebagai solusi jangka pendek.

Diharapkan dengan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi dapat membawa manfaat nyata masyarakat Indonesia. Hal-hal yang harus dilakukan adalah pengendalian BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran, dukungan perangkat kebijakan operasional dan pengawasannya yang ketat pada tataran praktis dan serta kesepahaman dan dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

D. Penutup

Defisit Neraca Perdagangan Indonesia pada bulan Februari disebabkan oleh besarnya defisit sisi neraca perdagangan migas. Defisit neraca perdagangan cukup mengkhawatirkan karena nilainya akan selalu meningkat. Salah satu upaya untuk memangkas defisit adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi karena defisit banyak disumbang oleh transaksi perdagangan migas. Pengendalian BBM bersubsidi merupakan salah satu cara dalam menjembatani kesehatan fiskal tanpa membahayakan perekonomian nasional secara keseluruhan, serta proteksi kepada penduduk miskin dan hampir miskin. Pengendalian BBM bersubsidi juga ditujukan untuk mengurangi risiko terlampauinya kuota BBM bersubsidi yang telah disepakati antara Pemerintah dan DPR pada tahun ini.

Untuk mengatasi masalah kelangkaan bahan bakar bersubsidi, pemerintah perlu menganalisa dan memilih strategi mana yang merupakan usaha untuk menjadi jalan keluar dan menentukan tindakan alternatif yang paling baik untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar bersubsidi ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah dampak penghapusan subsidi BBM terhadap masyarakat, pelaku ekonomi dan keuangan negara, pelaksanaan skenario penghapusan akan dilakukan secara bertahap atau sekaligus, dampak penghapusan BBM terhadap daya saing dan peluang usaha Pertamina serta merumuskan *setting pricing policy* yang sebaiknya ditempuh pemerintah dalam rangka mencapai kondisi optimal untuk perekonomian.

Rujukan:

1. "Defisit Perdagangan Akibat Kegagalan Pengendalian BBM," <http://bisniskeuangan.kompas.com>, diakses 4 April 2013.
2. "Economic Profile," <http://www.kemendag.go.id>, diakses 4 April 2013.
3. "RI Kesulitan Kurangi Impor Migas," <http://www.republika.co.id>, diakses 4 April 2013.
4. "Impor Migas Kembali buat Defisit Neraca Perdagangan," <http://merdeka.com>, diakses 4 April 2013.